

BAB IV

KESIMPULAN

Sejak tahun 1960, Korea Selatan mengalami kurangnya populasi penduduk atau krisis demografi. Isu ini telah menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Korea Selatan hingga era pemerintahan Moon Jae In karena belum ditemukan penyelesaian yang efektif untuk menangani krisis tersebut. Masyarakat Korea telah mengalami transformasi besar sejak tahun 1960. Keajaiban ekonomi, transisi demografis, urbanisasi, perubahan dalam kehidupan keluarga, dan pembentukan masyarakat sipil merupakan fitur utama dari transformasi. Sebelum ekonomi Korea bangkit dari stagnasi tradisionalnya, Korea adalah salah satu negara termiskin di dunia, dengan sedikit sumber daya alam dan tekanan populasi yang berkembang pesat. Pada saat krisis ini, negara ini memulai perjalanannya menuju pembangunan dan modernisasi.

Transisi demografis Korea dimulai pada awal abad ke-20 dengan diperkenalkannya sistem medis dan kesehatan Barat. Angka kematian menurun, dan harapan hidup orang Korea meningkat dari 37 tahun menjadi 52 tahun. Peningkatan tingkat pertumbuhan populasi memperburuk tekanan pada sumber daya lahan. Menanggapi tekanan populasi yang tinggi ditambah dengan kemiskinan yang ekstrim, pemerintah menjadi lebih terlibat dalam keluarga

berencana. Fertilitas mulai menurun dengan cepat pada pertengahan 1960-an. Fertilitas terus menurun sehingga tingkat kesuburan tahun 2000 harus mengarah pada pengurangan populasi 30% dalam 30 tahun.

Dengan adanya transisi kesuburan, angka kematian di Korea Selatan ikut menurun. Harapan hidup saat lahir diperkirakan 52,4 tahun pada 1960 dan mencapai 75,5 tahun pada 1999. Penuaan populasi adalah akibat langsung dari tren demografis ini. Proporsi populasi berusia 65 dan lebih tua adalah 2,9% pada tahun 1960, dan meningkat menjadi 5,1% pada tahun 1990, dan menjadi 7,2% pada tahun 2000. Penurunan kesuburan juga membawa pengurangan signifikan dalam ukuran keluarga. Ukuran rumah tangga rata-rata menurun dari 5,5 menjadi 3,3 orang antara tahun 1960 dan 1995.

Ketika suatu negara mengalami perubahan ekonomi, efek transisi bukan hanya mempengaruhi bidang finansial namun juga memiliki efek yang besar pada bidang populasi. Hal tersebutlah yang terjadi di Korea Selatan dimana selama tiga generasi terakhir, Korea Selatan telah mengalami perubahan ekonomi karena industrialisasi. Perubahan ekonomi Korea Selatan akhirnya juga mengubah populasinya, dengan sangat cepat, Korea Selatan mengalami krisis demografi.

Penyebab krisis demografi yang pertama ialah, Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan

terendah di dunia. Rata-rata wanita Korea Selatan hanya memiliki 1,1 anak, lebih rendah dari negara lain. (Sebaliknya, rata-rata global adalah sekitar 2,5 anak.) Angka ini telah menurun dengan cepat: antara awal 1950-an dan hari ini, tingkat kesuburan di Korea Selatan turun dari 5,6 menjadi 1,1 anak per wanita. Penyebab krisis demografi di Korea Selatan yang kedua ialah karena fenomena *Single in Sampo Generation*. Wanita Korea Selatan tidak hanya memilih untuk memiliki anak lebih sedikit - beberapa memilih untuk tidak menikah sama sekali. Pergeseran ini merupakan bagian dari fenomena sosial yang meningkat di Korea Selatan: Generasi Sampo. Kata 'sampo' berarti menyerahkan tiga hal: hubungan, perkawinan dan anak-anak. (Quick, 2019) Penyebab krisis demografi di Korea Selatan yang ketiga ialah *Extraordinary longevity*. Perbaikan dalam perawatan kesehatan umumnya mengarah ke populasi dengan umur panjang. Hal tersebutlah yang terjadi di Korea Selatan, di mana harapan hidup telah meningkat dengan cepat di paruh kedua abad ke-20 di tengah industrialisasi. Saat ini, Korea Selatan sekarang merupakan negara dengan salah satu harapan hidup tertinggi di dunia.

Krisis demografi tersebut akhirnya mampu menciptakan krisis perekonomian bagi Korea Selatan pada masa mendatang. Masyarakat lanjut usia di Korea Selatan mampu menyeret pertumbuhan investasi dan produktivitas, yang

pada akhirnya memperlambat pertumbuhan PDB. Penuaan populasi cenderung membuat negara kurang produktif. Banyak orang tua yang pensiun, yang berarti mereka tidak lagi berkontribusi banyak pada produksi ekonomi, dapat memperlambat pertumbuhan output per kapita. Dan ketika rasio pensiunan terhadap pekerja tumbuh, setiap pekerja harus menghabiskan lebih banyak uang, waktu dan upaya untuk mendukung pasukan lansia yang semakin bertambah. Selain itu di Korea Selatan, warga negara yang berbadan sehat yang berusia antara 18 dan 40 tahun diharuskan untuk bertugas di militer selama hampir dua tahun. Dengan krisis populasi yang meningkat dan secara teknis perang yang sedang berlangsung dengan Korea Utara, Korea Selatan akan mengalami kekurangan tenaga manusia.

Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In mengumumkan serangkaian langkah-langkah untuk menghapus penyebab mendasar dari penurunan angka kelahiran di negara itu. Kementerian mengatakan negara akan bertanggung jawab atas biaya medis untuk bayi berusia kurang dari satu tahun mulai tahun depan. Pada bulan Desember, Komite Presidensial untuk Masyarakat Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan mengatakan akan mengubah arah untuk fokus pada "meningkatkan kualitas hidup setiap generasi", menurut Yonhap. Hal yang lebih diutamakan oleh pemerintahan Moon ialah

diharapkan akan ada lebih banyak tenaga kerja perempuan yang mempertahankan keinginan untuk memiliki anak. Tujuan berikutnya adalah untuk mendapatkan lebih banyak pria Korea yang mengambil cuti ayah secara dibayar yang secara hukum dapat mereka dapatkan ketika seorang anak lahir.

Kemudian, Kementerian mengatakan akan memfokuskan perubahan kebijakannya pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif bagi perempuan untuk tetap bekerja bahkan jika mereka memiliki anak. Kebijakan kompatibilitas pekerjaan dan rumah Korea Selatan perlu ditingkatkan lebih lanjut bagi perempuan untuk melanjutkan karir mereka. Selain itu, Pemerintah berencana untuk memotong jumlah pasukan tetap yang bertugas aktif sambil mereformasi militer dengan cara yang memanfaatkan teknologi seperti drone yang dipersenjatai dan satelit pengintaian untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di masa depan.

Strategi yang digunakan oleh Moon Jae In untuk menyelesaikan krisis di Korea Selatan dapat dianalisis berdasarkan teori *human development*. *Human development* atau pendekatan pembangunan manusia memberikan penjelasan bahwa proses pembangunan, khususnya pembangunan internasional merupakan proses melalui peningkatan kualitas kehidupan manusia bukan hanya sekedar meningkatkan perekonomian suatu negara.

Strategi yang dilaksanakan Moon Jae In didasari oleh 2 dimensi yang dicakup oleh *human development*. Dimensi yang pertama yaitu secara langsung meningkatkan kemampuan manusia yang meliputi indeks harapan hidup, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Dimensi yang kedua yaitu menciptakan kondisi untuk pembangunan manusia yang meliputi partisipasi dalam ranah politik, ketahanan lingkungan, perlindungan dan hak asasi manusia, serta kesetaraan gender.